

## Analisa Hasil Audit Pemerintah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

Ahmad Ulil Albab Al Umar ([ahmadulil.asfebi@gmail.com](mailto:ahmadulil.asfebi@gmail.com))

Anava Salsa Nur Savitri ([anavasalsa@gmail.com](mailto:anavasalsa@gmail.com))

IAIN SALATIGA

### Abstract

This research aims to analyze the influence of government auditing results such as audit opinion, audit finding, audit retrification on the level of corruption in Central Java Province. This research uses purposive sampling and the research uses secondary data from audit results of State audit board of indonesia (BPK-RI) and data total corruption from Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) and Indonesian Corruption Watch (ICW). The population in this study is all districts and cities in central Java Province.

The results of this study showed that audit opinion has negative effect on corruptin level, and that partials audit finding has negative effect and significant on corruption level and audit retrification has positive effect and signifikan on corruptin level. Simultaneously, these variables have significant influence on corruption level.

*Keywords : Goverment auditing results, audit opinin, audit finding, audit rectification, corruption level*

### PENDAHULUAN

Dewasa ini Indonesia masih menjadi Negara yang paling bermasalah dalam korupsi di dunia. Data *Transparency International* (TI) mengenai peringkat *corruption perception index* untuk tahun 2018 menempatkan Indonesia pada ranking 89 dari 180 negara dengan nilai 38 , ini meningkatkan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berada di posisi ke 96 dengan skor 37. Artinya Indonesia tidak lebih baik maupun buruk dalam hal korupsi lebih pada stagnan. Menurut Department Riset *Transparency Internasional* (TI) dalam lingkup ASEAN Indonesia berada di posisi ke 4 setelah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapore dalam hal tingkat korupsi.

Donald R. Cressy dalam bukunya yang berjudul *Others People Money, A study in the social Psychology Of Embezzlement* penyebab korupsi digambarkan sebagai Fraud Triangle,

yaitu a). Motive/niat : kekuatan penggerak yang mengubah dari taat hukum menjadi pelaku fraud, keserakahan, keuangan negara, rasa balas dendam, tekanan keluarga dan ego; b). Opportunity/Kesempatan : lingkungan yang mendukung terjadinya fraud, pengendalian intern tidak memadai, dan kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya; c). Rationalization/pembenaran : tidak menyangka bahwa mereka akan ditangkap, justifikasi perilaku tidak layak maupun orang lain juga melakukan hal serupa.

Di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Tengah menurut *Indonesia corruption watch* (ICW) mencatat Jawa Tengah sebagai provinsi kedua untuk kasus korupsi di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori memprihatinkan dalam hal korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai badan mengaudit laporan keuangan seharusnya mampu untuk mengurangi korupsi, namun beberapa waktu ini opini yang dikeluarkan BPK atas Laporan Keuangan Daerah menjadi sorotan. Hal ini disebabkan banyak opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK ke sejumlah Provinsi di Jawa Tengah tapi masih terindikasi korupsi/suap yang dilakukan oleh pejabat/instansi di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan dari data yang dirilis *Indonesian corruption watch* (ICW) kasus korupsi di Jawa Tengah selama tahun 2018 sebanyak 36 kasus dengan 65 tersangka dan kerugian Negara 156,9 miliar. Jawa Tengah berada di posisi kedua provinsi terkorup setelah Jawa Timur dengan 52 kasus dengan 135 tersangka dan kerugian Negara 125,9 miliar. Dibandingkan data ICW tahun 2017 jumlah korupsi di Jawa Tengah mengalami kenaikan. Pada 2017 ICW mencatat ada 29 kasus dengan kerugian Negara 40,3 miliar.

Rini dan Sarah (2014) menyatakan opini audit yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi. Sedangkan dari Masyitoh dkk (2015) menunjukan opini audit, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tindak lanjut audit berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Namun, berbeda dengan yang dijelaskan oleh Heriningsih dan Marita (2013) yaitu opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Selanjutnya, Effendy (2013) opini audit tidak dapat dipastikan menjamin baik dan buruknya pengelolaan keuangan. Dan, menurut Rini dan Liska (2017) bahwa opini audit, temuan audit, pembenaran audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

### **Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi di Jawa Tengah ?
2. Apakah terdapat pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi di Jawa Tengah?
3. Apakah terdapat pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di Jawa Tengah?
4. Apakah terdapat pengaruh opini audit, temuan audit, dan perbaikan audit sama sama berpengaruh terhadap tingkat korupsi di Jawa Tengah?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi di Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap tingkat korupsi di Jawa tengah
3. Untuk mengetahui pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di Jawa tengah
4. Untuk mengetahui pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi di Jawa Tengah

### **TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **1. Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori Keagenan ( Agency Theory ) adalah konsep teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara principal dan agent, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok maupun organisasi (Menurut Jansen dan Meckling : 1976). Teori keagenan digunakan dalam acuan dalam Penelitian guna menjelaskan konflik antara principal yaitu masyarakat dengan agent yaitu pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Teori keagenan berpendapat bahwa akan terjadi asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat karena pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi mengenai keuangan dalam bentuk Laporan keuangan Pendapatan daerah masing-masing. Asimetri ini yang memungkinkan berpeluang terjadinya penyelewengan korupsi oleh agent.

Konsekuensi adanya agency problem adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota harus melakukan pengawasan dengan penuh kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuknya adalah melakukan audit Laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah tersebut. Selain itu guna sebagai transparasi agar tidak terjadi asimetri

informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat maka pemerintah daerah harus meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sehingga memungkinkan untuk melakukan penyelewangan korupsi menjadi lebih kecil.

## 2. Opini Audit

Opini audit yaitu laporan yang diberikan serorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (ardiyos, 2007). Selain itu, opini audit merupakan suatu laporan dari auditor yang terdaftar mengenai pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan dan ditambah dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa (Tobing, 2004).

Opini audit adalah hasil dari poses audit serta salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rosietta, 2009). Sama halnya dengan pendapat Setyowati (2013) bahwa kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari opini audit. Hubungan antara opini audit dan tingkat korupsi menurut Rini dan Sarah (2014) menyatakan opini audit yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi. Dari pendapat-pendapat tersebut maka opini audit dihipotesiskan berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

### **H1 : opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.**

## 3. Temuan Audit

Temuan audit merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan temuan audit baik temuan atas pengendalian internal maupun temuan ketidakpatuhan atas perundang-undangan. Ferraz dan Finan, 2011 menyatakan peraturan dalam pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas yang memainkan peran penting dalam mengurangi korupsi. Begitu pula dengan Najahningrum, 2013 yang menyebutkan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pada dinas DIY. Sedangkan menurut, Masyitoh dkk, 2015 menyatakan bahwa temuan audit atas ketidakpatuhan pada perundang-undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, temuan audit dapat digunakan untuk mendeteksi adanya korupsi. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

### **H2: Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.**

#### 4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Menurut Liu dan Lin, 2012, pembetulan setelah adanya proses audit lebih penting dari deteksi atas temuan audit itu sendiri karena upaya untuk melakukan pembetulan audit dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Hal serupa dikemukakan oleh Umar, 2012 bahwa dengan adanya masukan dari auditor, pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, serta pemborosan.

Sementara, Masyitoh dkk., 2015 yang menyatakan tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hasil serupa dikemukakan oleh Liu dan Lin, 2012 bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil audit memiliki pengaruh terhadap korupsi. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi berpengaruh negative terhadap tingkat korupsi.**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan sampel penelitian 35 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Tahun yang dijadikan dasar pengambilan data adalah tahun anggaran 2015-2017. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Kota dan kabupaten yang memperoleh opini, temuan, dan tindak lanjut hasil audit dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI.
2. Kota/kabupaten yang memiliki data yang lengkap seluruh variable tahun 2015-2017.

Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji statistik F, dan uji statistik T. Menggunakan alat uji *Statistical Package For the Social Sciences* (SPSS) v23.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

## Proses Seleksi Sampel

| No | Kriteria   | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Jumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah                 | 35     |
| 2  | Dikali jumlah tahun                                      | 3      |
| 3  | Ukuran sampel awal                                       | 105    |
| 4  | Kabupaten dan kota yang dikeluarkan<br>- Outlier Ekstrim | (19)   |
| 5  | Jumlah sampel akhir                                      | 86     |

Sumber : Data Diolah (2019)

Sampel yang digunakan dalam Penelitian ini dipilih secara purposive sampling, sehingga sampel dalam Penelitian ini merupakan pemerintah kabupaten dan kota yang memiliki kriteria sesuai Tujuan Penelitian. Kabupaten dan kota yang tidak memiliki data lengkap dikeluarkan dari sampel karena tidak tersedianya data mengenai Laporan hasil keuangan dan jumlah kasus korupsi di setiap kabupaten dan kota. Sehingga ukuran sampel akhir adalah 86 pengamatan.

## a. Uji Asumsi Klasik

## 1. Uji autokorelasi

Uji asumsi klasik dalam Penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dimana uji autokorelasi digunakan hanya dipakai untuk data time series (data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu) sejalan dengan Penelitian ini yang menggunakan selan waktu tahun 2015-2017.

Model Summary<sup>b</sup>

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,437 <sup>a</sup> | ,191     | ,161              | ,556                       | 1,901         |

a. Predictors: (Constant), TINDAK, OPINI, TEMUAN

b. Dependent Variable: KASUS

Berdasarkan table output Model Summary diatas diketahui nilai durbin Watson (d) adalah sebesar 1,901. Selanjutnya nilai ini dibandingkan dengan nilai

dibandingkan dengan nilai table durbin Watson pada signifikansi 5% dengan rumus (K;N) maka ditemukan dL sebesar 1,5780 dan dU sebesar 1,7221.

Nilai durbin Watson (d) sebesar 1,901 lebih besar dari batas atas (dL) dan kurang dari (4-dU)  $4-1,7221=2,2779$ . Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji durbin Watson dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah/gejala autokorelasi sehingga dapat dilanjutkan ke uji regresi berikutnya.

b. Uji koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi menjelaskan tentang variasi pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

**Model Summary<sup>b</sup>**

| Model | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1     | ,437 <sup>a</sup> | ,191     | ,161              | ,556                       | 1,901         |

a. Predictors: (Constant), TINDAK, OPINI, TEMUAN

b. Dependent Variable: KASUS

Berdasarkan table modal summary diatas diketahui nilai R menunjukkan 0,437 atau 43,7 % memiliki hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen cukup kuat karena hamper mendekati nilai  $R > 0,50$  atau 50%.

Adapun nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,161 atau 16,1%. Hal ini berarti variabel independen yaitu opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit mempengaruhi variabel dependen atau tingkat korupsi sebesar 0,161 atau 16,1% sedangkan 0,848 atau 84,9% factor-faktor lain yang tidak dimasukkan di dalam Penelitian ini, seperti kapabilitas internal auditor (Isnumawan, 2016) dan kinerja keuangan (Heriningsih dan Marita, 2012).

c. Uji Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant) | ,774                        | ,563       |                           | 1,374  | ,173 |                         |       |
| OPINI        | -,049                       | ,147       | -,034                     | -,334  | ,740 | ,961                    | 1,041 |
| TEMUAN       | -,686                       | ,157       | -,761                     | -4,375 | ,000 | ,326                    | 3,065 |
| TINDAK       | ,536                        | ,156       | ,601                      | 3,427  | ,001 | ,321                    | 3,117 |

a. Dependent Variable: KASUS

Berdasarkan uji regresi linear berganda diolah menggunakan SPSS v23 maka dapat diperoleh hasil perhitungan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,774 - 0,049\text{opini} - 0,686\text{temuan} + 0,536\text{tindak} + e$$

Interpretasi dari rumus diatas adalah :

1. Konstanta (a)

Persamaan diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta 0,774. Hal ini menunjukkan nilai a sebesar 0,774 artinya tanpa mempertimbangkan pengaruh manapun yang tidak diteliti dalam penelitian ini maka nilai tingkat korupsi sebesar 0,774 dan nilai opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit sama dengan nol (0) maka nilai tingkat korupsi tetap 0,774.

2. Opini audit

Nilai koefisien factor opini audit sebesar  $-0,049$  dan bernilai negative. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan factor opini audit sebesar satu satuan maka akan menurunkan variabel tingkat korupsi sebesar 0,049 dengan asumsi variabel dependen lain dari model regresi adalah tetap.

3. Temuan audit

Nilai koefisien factor temuan audit sebesar  $-0,686$  dan bernilai negative. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan factor opini audit sebesar satu satuan maka akan menurunkan variabel tingkat korupsi sebesar 0,686 dengan asumsi variabel dependen lain dari model regresi adalah tetap.

4. Tindak lanjut hasil audit

Nilai koefisien factor opini audit sebesar 0,536 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan factor opini audit sebesar satu satuan maka akan menaikkan variabel tingkat korupsi sebesar 0,536 dengan asumsi variabel dependen lain dari model regresi adalah tetap.

d. Uji F

Uji F digunakan untuk mengukur seberapa berpengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen.



ANOVA<sup>a</sup>

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F     | Sig.              |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1     | Regression | 5,968          | 3  | 1,989       | 6,436 | ,001 <sup>b</sup> |
|       | Residual   | 25,346         | 82 | ,309        |       |                   |
|       | Total      | 31,314         | 85 |             |       |                   |

a. Dependent Variable: KASUS

b. Predictors: (Constant), TINDAK, OPINI, TEMUAN

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F hitung 6,436 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat korupsi karena nilai signifikansi  $< 0,05$  atau 5%. Dengan nilai  $df_1 = 3$  dan  $df_2 = 82$  diperoleh F table sebesar 2,72 sehingga F hitung  $> F$  table sebesar  $6,436 > 2,72$  dan signifikansi  $< 0,05$  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit secara simultan terhadap tingkat korupsi di Provinsi Jawa Tengah.

## e. Uji t

Uji t dalam regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji seberapa pengaruh variabel independen secara sendiri-sendiri (parsial) yaitu opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit dalam menerangkan variabel dependen yaitu tingkat korupsi.

Coefficients<sup>a</sup>

| Model |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|       |            | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1     | (Constant) | ,774                        | ,563       |                           | 1,374  | ,173 |                         |       |
|       | OPINI      | -,049                       | ,147       | -,034                     | -,334  | ,740 | ,961                    | 1,041 |
|       | TEMUAN     | -,686                       | ,157       | -,761                     | -4,375 | ,000 | ,326                    | 3,065 |
|       | TINDAK     | ,536                        | ,156       | ,601                      | 3,427  | ,001 | ,321                    | 3,117 |

a. Dependent Variable: KASUS

Dari table diatas menunjukkan bahwa secara parsial dari ketiga variabel yaitu opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit variabel opini audit tidak berpengaruh signifikan berbeda dengan temuan audit dan tindak lanjut hasil audit. Berikut penjelasannya :

### 1. Opini audit

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan secara parsial variabel opini audit bernilai 0,740 yang berarti nilai ini lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 atau 5% yang telah ditentukan, sehingga variabel opini audit tidak signifikan dalam mempengaruhi tingkat korupsi.

### 2. Temuan audit

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan secara parsial variabel temuan audit bernilai 0,000 yang berarti nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang telah ditentukan sehingga variabel temuan audit signifikan terhadap mempengaruhi tingkat korupsi.

### 3. Tindak lanjut hasil audit

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan secara parsial variabel tindak lanjut hasil audit bernilai 0,001 yang berarti lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05 yang telah ditentukan sehingga variabel tindak lanjut hasil audit signifikan terhadap mempengaruhi tingkat korupsi.

## Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

### a. Pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi (H1)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel opini audit memiliki koefisien regresi sebesar -0,049 dengan nilai t hitung sebesar -0,334 dan tingkat signifikansi sebesar 0,740. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negative terhadap tingkat korupsi.

Opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi di Jawa Tengah sehingga hipotesis ke-1 berhasil diterima. Hasil Penelitian ini tidak mendukung pendapat dari Rini dan Sarah yang menyatakan bahwa opini audit yang baik mengindikasikan bebas dari korupsi.

Hasil Penelitian ini mendukung hasil Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liska Damianti dan Rini Rini, 2018 yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia.

Opini audit yang baik tidak menjamin bahwa suatu kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menilai tata kelola keuangan kabupaten dan kota tersebut adalah baik dan penyajiannya yang wajar bukan benar. Selain hal itu keterbatasan dalam proses

pengaudit tidak menyeluruh karena terkendala waktu dan biaya sehingga opini audit yang diberikan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menjadi jaminan bahwa opini yang baik tidak terdapat korupsi di Jawa Tengah.

b. Pengaruh Temuan audit terhadap tingkat korupsi (H2)

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel temuan audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat korupsi yang dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa temuan audit berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat korupsi. Kemudian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke-2 ditolak.

Hasil Penelitian ini tidak mendukung hasil Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Liu dan Lin, 2012 yang menyatakan temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi di provinsi di Cina. Selain itu temuan audit atas pengendalian intern dapat digunakan untuk mendeteksi adanya potensi kecurangan di pemerintah daerah kabupaten maupun kota (Huefner : 2011).

Penelitian ini mendukung hasil dari Penelitian Liska Damiati dan Rini Rini, 2018 yang membuktikan bahwa temuan audit atas kelemahan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di provinsi di Indonesia.

Temuan audit tidak berpengaruh karena temuan atas pengendalian intern masih mendeteksi potensi adanya kecurangan sehingga tidak serta merta menimbulkan kerugian dan pelanggaran dalam keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa tengah.

c. Pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi (H3)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi yang dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi sebesar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Kemudian disimpulkan bahwa hipotesis ke-3 ditolak karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh positif dan signifikan.

Hasil ini tidak mendukung Masyitoh dkk., 2015 yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negative terhadap persepsi korupsi. Kemudian hasil ini mendukung pernyataan Umar, 2012 dengan adanya masuka auditor, pihak

pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, dan penyelewangan.

Dengan melakukan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah daerah telah berupaya memperbaiki kesalahan namun tidak serta merta hal itu dapat mengurangi tingkat korupsi Karena korupsi datangnya dari sendiri hasrat ingin memperkaya diri sendiri, kurangnya kesadaran untuk berperilaku jujur, rendahnya iman dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbagai factor lain.

### **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Penelitian ini menguji pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap tingkat korupsi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sedangkan temuan audit dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu Penelitian ini dilakukan pada pertengahan tahun 2019 tapi masih meneliti tahun 2015-2017 saja karena data untuk 2018 belum sepenuhnya terpenuhi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kemudian dalam Penelitian ini untuk variabel temuan audit hanya mengambil atas kelemahan pengendalian intern tidak seperti Masyitoh, dkk., 2015 yang mengambil juga tentang temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Berdasarkan hasil Penelitian ini terdapat beberapa implikasi yang peneliti sampaikan. Pertama, peneliti mengharapkan untuk penelitian berikutnya supaya lebih lengkap lagi data dan tahunnya. Kedua, Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Jawa Tengah cukup tinggi dan stagnan tiap tahunnya sehingga diharapkan penelitian ini memotivasi pemerintah daerah yang berada pada Provinsi Jawa tengah untuk lebih melakukan pengawasan atas keuangan pemerintah daerah masing-masing untuk mengurangi tingkat korupsi. Ketiga, hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut hasil audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi sehingga rekomendasi untuk auditor dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan untuk meminimalisir dan mencegah untuk menurunkan tingkat korupsi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

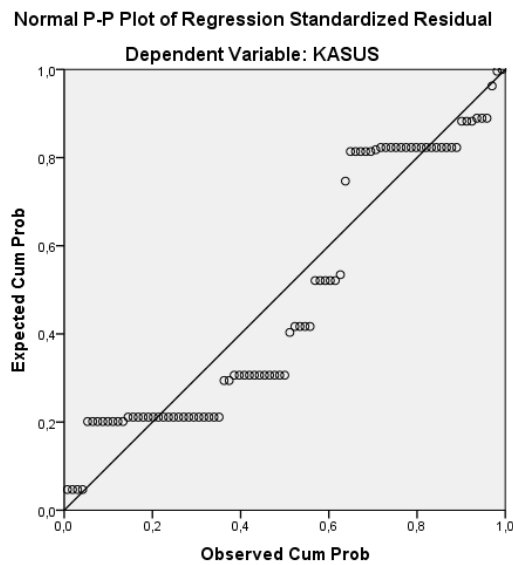
## Lampiran

### Cara Pengukuran variabel Penelitian

| No | Variabel                  | Jenis variabel | Indikator   | Skala Pengukuran | Sumber Data  |
|----|---------------------------|----------------|---|------------------|--|
| 1  | Opini audit               | Independen     | WTP = 4<br>WDP = 3<br>TW = 2<br>TMP = 1   | Rasio            | IHPS BPK<br>2015-2017  |
| 2  | Temuan audit              | Independen     | 0-3 temuan=1<br>4-7 temuan=2<br>8-11 temuan=3<br>>12 temuan=4                   | Rasio            | LHP LKPD   |
| 3  | Tindak lanjut hasil audit | Independen     | 0-3 tindak=1<br>4-7 tindak=2<br>8-11 tindak=3<br>>12 tindak=4                   | Rasio            | LHP LKPD   |
| 4  | Tingkat korupsi           | Dependen       | Jumlah kasus korupsi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017 | Rasio            | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) |

Sumber : data diolah

## 1. Hasil Uji Normalitas



## 2. Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients<sup>a</sup>

| Model        | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | T      | Sig. | Collinearity Statistics |       |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
|              | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      | Tolerance               | VIF   |
| 1 (Constant) | ,774                        | ,563       |                           | 1,374  | ,173 |                         |       |
| OPINI        | -,049                       | ,147       | -,034                     | -,334  | ,740 | ,961                    | 1,041 |
| TEMUAN       | -,686                       | ,157       | -,761                     | -4,375 | ,000 | ,326                    | 3,065 |
| TINDAK       | ,536                        | ,156       | ,601                      | 3,427  | ,001 | ,321                    | 3,117 |

a. Dependent Variable: KASUS

## 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

